



Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Suryanto¹, Ahmad Djunaedi², dan Sudaryono²

[Diterima: 5 Mei 2015; disetujui dalam bentuk akhir: 7 Juli 2015]

Abstrak. Dengan ditetapkannya budaya dan tata ruang kota sebagai penanda keistimewaan Yogyakarta dalam UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, maka Yogyakarta merupakan kasus spesifik dalam Penataan Ruang, karena aspek Tata Ruang menjadi salah satu penanda Keistimewaannya. Apa yang istimewa. Apanya yang istimewa dan mengapa istimewa; apakah penanda (tata ruang kota), petanda (konsep budaya) atau makna/pesan dari hubungan antara petanda dengan penandanya yang tersirat dalam wujud tata ruang kota Yogya. Penelitian ini berupaya untuk mengenali dan memahami hubungan antara kebudayaan, tata kota dan keistimewaan Yogyakarta. Dari bukti-bukti empiris, kajian tentang kebudayaan dan tata ruang kota memerlukan rentang waktu panjang, karena akan menyangkut data longitudinal (diakronik) dan lateral (sinkronik). Oleh karena itu studi ini perlu didudukkan dalam bingkai sejarah dan budaya, untuk membaca peristiwa sepanjang perkembangan kota Yogyakarta, dari HB I sampai HB IX. Kemudian untuk memahami makna kaitan antar penanda dan petanda sepanjang perjalanan perkembangan kota, maka digunakan metoda hermeneutika, khususnya Hermeneutik Paul Ricoeur. Dari hasil kajian terhadap obyek tata ruang kota yang dianggap istimewa, maka budaya yang mewujud dalam keistimewaan tata ruang kota Yogyakarta bisa dilihat dari komponen ruang kotanya maupun konfigurasi fungsi ruang kotanya. Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah konsep budaya yang mewujud dalam tata ruang kota, yaitu monumental dan pertahanan, yang tidak ditemui di kota manapun di Indonesia. Kemudian dari sisi makna, terjadi perbedaan makna simbol-simbol tata ruang kota di era HB I dan HB IX.

Kata kunci. Kebudayaan, tata ruang kota, budaya, Yogyakarta.

[Received: 5 May 2015; accepted in final version: 7 July 2015]

Abstract. Since Yogyakarta's culture and spatiality were proclaimed as special features of Yogyakarta as stated in Law No. 13, 2012 on the Special Region of Yogyakarta, Yogyakarta is recognized as a specific case in spatial planning, because its spatiality is one of the attributes that make it exceptional. Why is it exceptional and how is it exceptional? Because of its attributes (the space), its signature (the cultural concept), or the meaning/message of the relationship between its attributes and signature, which is implicitly manifested in Yogyakarta's spatiality? This research was aimed at identifying and explaining the relationship between the culture, spatial planning and special features of Yogyakarta. Research about culture and spatial planning based on empirical evidence takes a long time to complete, because it involves longitudinal and lateral (synchronic) data. Therefore, this study needed to utilize a historical and cultural framework in order to interpret events in the development of the city from the reign of Sultan Hamengkubuwono I to that of Hamengkubuwono IX. Additionally, in order to understand the meaning of the relationship between the attributes and the signature of the city

¹ Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281,
E-mail: soer141@yahoo.com

² Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

throughout its development, the hermeneutic method of Paul Ricoeur was used. The results of this study of the spatial planning features of Yogyakarta that are considered exceptional reveal the culture that expresses itself in the components and functional configuration of Yogyakarta's urban space. An important finding from this research is that there is a cultural concept that manifests itself in the city's spatiality, i.e. monumental and defensive, which cannot be found in any other city in Indonesia. Moreover, it was found that there has been a change in the meaning of the city's spatial symbols from the era of Hamengkubuwono I to the era of Hamengkubuwono IX.

Keywords. *Culture, spatial planning, culture, Yogyakarta*

Pendahuluan

Latar Belakang dan permasalahan penelitian.

Kota sebagai produk budaya adalah fakta yang diyakini oleh peneliti dari berbagai bidang ilmu, seperti Lewis Mumford, Sjoberg, Staniwslasky, Spiro Kostof, PJM Nas dan lain lain³. Bangunan, jalan, tugu, lapangan dan wujud fisik komponen kota lain yang menjadi *ikon* kota menjadi penanda dari kebudayaan dan peradaban kota yang bersangkutan. Oleh karena itu hampir semua kota mempunyai penanda tersebut. Tetapi tidak semua penanda tersebut dapat disebut sebagai sesuatu yang istimewa, jika tidak ada penjelasan tentang “keistimewaannya”.

Selama ini, penelitian-penelitian tentang hubungan budaya dan tata ruang kota menghasilkan pengelompokan tata ruang kota seperti pengelompokan perkembangan budaya, yaitu kota pra sejarah, tradisional/pra industri, industri/modern dan *post modern*. Setiap periode kebudayaan meninggalkan jejak-jejak yang mewujud dalam tata ruang kotanya. Tidak ada hal istimewa, karena jejak-jejak tersebut berlaku umum, dikenal sebagai struktur konsentrik, sektoral, *multi-nuclei*, monumental, compound atau organis.

Di Indonesia, permasalahan tersebut menjadi rancu di Yogyakarta, karena dalam UU Nomor 13 tahun 2012 secara eksplisit disebutkan budaya (pasal 31) dan Tata Ruang (pasal 34 dan 35) adalah penciri keistimewaan Yogyakarta. Jika yang istimewa itu budaya Jawa, maka Yogya hanya salah satu dari pusat budaya Jawa. Demikian pula halnya dengan “Tata Ruang”, banyak kota-kota tua yang tata ruangnya menyerupai Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintah daerah terlihat kerepotan untuk merumuskan kebijakan Tata Ruang yang memenuhi kebutuhan untuk menguatkan wujud budaya dalam tata ruang kota. Kebutuhan tersebut akhir akhir ini menjadi semakin mendesak, sehubungan dengan kuatnya arus globalisasi dan investasi yang masuk ke Yogyakarta, yang ditandai oleh maraknya pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dan

³Gideon Sjoberg (1960, 27 -31) dalam bukunya *The Pre Industrial City, Past and Present*, menyimpulkan mengenai hubungan antara budaya dan tata ruang kota dengan menyebut syarat syarat terbentuknya kota, yaitu lingkungan ekologi, teknologi dan organisasi social. Teknnologi dan organisasi social tidak lain adalah kebudayaan. Spiro Kostof (1992: 37-40) secara eksplisit menyebutkan hubungan kebudayaan dengan tata ruang kota dengan mendefinisikan ciri ciri kota dalam 9 butir, yaitu lingkungan, sumberdaya, wilayah pendukung, masyarakat, bangunan, batas keliling, tata tulis, diversifikasi kerja dan monument. Empat dari ciri tersebut adalah komponen budaya, sisanya ruang dan manusia. Menurut Hermanislamet, difinisi Kostof tersebut sudah mengakomodasi teori Sjoberg, Mumford, Childe dan Withley (Hermanislamet B, 1999, 27-30).

perumahan kelas atas⁴. Ada kekhawatiran “ruh” keistimewaan akan hilang, jika tidak ada tindakan yang tepat untuk melestarikan dan menguatkan keistimewaan Tata Ruang kota Yogyakarta (Kedaulatan Rakyat, 31 Maret 2015).

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut :

- Seperti apakah aspek kebudayaan mewujud sebagai keistimewaan Tata Ruang kota Yogyakarta?
- Mengapa wujud tata ruang tersebut dapat disebut sebagai penanda keistimewaan aspek budaya di kota Yogyakarta?

Dari pemahaman tentang apa dan mengapa wujud keistimewaan tata ruang kota Yogyakarta tersebut, maka diperoleh manfaat sebagai berikut :

- Pada level konseptual, penjelasan tentang wujud budaya dalam tata ruang kota dapat digunakan untuk memahami (understanding) *spirit* (ruh) dari kota yang bersangkutan.
- Pada level operasional, dengan memahami *spirit* dari keistimewaan tersebut, maka dapat dirumuskan kebijakan pengembangan kota untuk memperkuat ruh (identitas) kota, sebagai sumber energi perkembangan kota Yogyakarta.

Metodologi

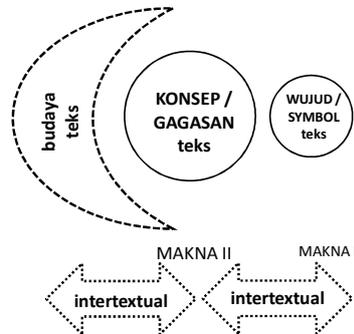
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan Hermeneutik. Bingkai sejarah digunakan sebagai kisi-kisi, karena secara empiris, studi mengenai kebudayaan dan wujud fisik kota membutuhkan informasi jangka panjang (Padison, 2001). Kemudian keistimewaan sebagai sifat juga hanya bisa diuji melalui rentang waktu panjang (KBBI daring, 2014).⁵ Sedang untuk memahami hubungan penanda (wujud fisik) dan petanda (konsep budaya) digunakan metoda Hermeneutika Paul Ricoeur (2008). Hermeneutika sendiri mempunyai banyak variasi, seperti versi Edmund Huserl, Schleimacher, Gadamer dan Paul Ricoeur. Metoda Paul Ricoeur dipilih karena merupakan hermeneutik yang adaptif terhadap pertentangan di antara metoda hermeneutik yang lain (Palmer, 1975)⁶. Secara skematik, pendekatan penelitian dapat dilihat dalam skema berikut:

⁴ Detikcom, diunggah 10 Juni 2015; Maraknya pembangunan hotel dan mal beberapa tahun terakhir telah merusak keistimewaan Yogyakarta. Diskusi Yogya Sold Out, Fisipol UGM, 22 April 2015.

⁵ Paul Ricoeur dalam Palmer (1969) maupun artikelnya *Phenomenology and Hermeneutics* (1975), mendefinisikan kembali Hermeneutik sebagai analisis tekstual, yang memiliki konsep konsep distingtif serta sistimatis. Hermeneutik adalah peraturan peraturan yang menuntun sebuah proses penafsiran, yakni penafsiran atas teks partikular ataupun kumpulan tanda tanda yang juga dapat disebut teks. Obyek dari penafsiran adalah teks dalam arti seluas luasnya, dapat berupa simbol dalam tulisan ataupun didalam masyarakat. Hermeneutika harus membentuk semacam kesatuan arti yang koheren dari teks yang ditafsirkan, sekaligus memiliki relevansi lebih dalam serta lebih jauh ke depan. Karena adanya berbagai ragam penafsiran, Ricoeur merumuskan dua bentuk Hermeneutika, yaitu Hermeneutika sebagai upaya penafsiran untuk menangkap makna tersembunyi didalam suatu teks atau simbol dan Hermeneutika sebagai cara untuk bersikap kritis dan kemudian meruntuhkan semua bentuk ilusi ataupun kesadaran palsu, yang mungkin muncul dari simbol simbol atau teks tertentu. Dengan begitu, tidak ada satu bentuk norma universal didalam penafsiran manusia, melainkan teori teori yang terpisah dan saling berdebat satu sama lain

⁶ KBBI daring 2014: Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan 2014.

METODA HERMENEUTIK DALAM PEMAKNAAN TATA RUANG KOTA



Gambar 1: Skematik Metoda Hermeneutik dalam pemaknaan ruang
Sumber: Suryanto, 2015

Kajian Pustaka

Tata Kota Sebagai Produk Budaya.

Kota pada dasarnya adalah produk dari perkembangan kebudayaan manusia, karena hakikat kota adalah tempat bermukim. Oleh karena itu, keberadaan kota hampir setara kebudayaan manusia. Kota adalah lokasi dimana kekuasaan, kekayaan dan peradaban manusia berkembang. Sejarah peradaban manusia bahkan dilacak dengan penelitian dari puing-puing reruntuhan kota-kota di lembah Mesopotamia, yang diperkirakan umurnya 4000–3500 SM. Permukiman yang lebih muda ada di lembah Indus dan Nil sekitar 3000–2000 SM, lokasi tersebut dianggap sebagai awal kebudayaan kota. (Short, 1984).

Lewis Mumford (1938) mendiskripsikan kota sebagai berikut:

“The City, as one finds it in history, is the point of maximum concentration for the power and culture of a community. It is the place where the diffused rays of many separate beams of life fall into focus, with gains in social effectiveness and significance. The city is the form and symbol of an integrated social relationship; it is the seat of the temple, the market, the hall of justice, the academy of learning. Here in the city the goods of civilization are multiplied and manifold; here is where human experience is transformed into viable signs, symbols of conduct, system of order”. (Mumford, L, 1938/1995: 104).

Dalam bahasa yang berbeda Raymond Williams mendeskripsikan kota sebagai berikut :

“ The great buildings of civilization, the meeting places, the libraries and the theatres and domes, and often more moving than these, the houses, the streets, the press and excitement of so many people with so many purposes. I have stood in so many cities and felt this pulse: in the physical differences of Stockholm and Florence, Paris and Milan”. (William, 1973:14).

Walaupun pemerianannya berbeda, tetapi hakekatnya sama. Menurut mereka perkembangan kota sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Oleh karena itu, periode perkembangannya juga sesuai dengan perubahan budaya penduduk kota. Secara garis besar, kaitan perkembangan budaya dengan wujud kotanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Awal keberadaan kota (Kota-kota awal).

Dari bukti-bukti arkeologis, awal keberadaan kota erat kaitannya dengan terjadinya surplus produk pertanian. Untuk mengelola surplus tersebut, diperlukan penguasa, yang mampu menjaga kondisi surplus tersebut. Penguasa atau elite dari kelompok tersebut (kaum aristokrat) membutuhkan tempat, baik untuk melindungi maupun menjadikan surplus tadi menjadi sumber pendapatan bagi kelompok. Budaya seperti itu tercermin dalam bentuk dan struktur kotanya (Short, 1984). Kota masa pra sejarah secara umum strukturnya konsentris, dengan pusatnya adalah tempat tinggal penguasa, bangunan-bangunan keagamaan dan lapangan sebagai tempat upacara penting. Pusat kota tersebut dikelilingi oleh perumahan yang dihuni oleh strata sosial yang berlapis, sesuai piramida kekuasaan atau strata sosial, kemudian dikelilingi oleh tembok atau pagar pertahanan (Sjoberg, 1960; Radford, 1979; Mumford, 1991; Bounds, 2004). Struktur kota tersebut hampir tidak berubah sampai abad pertengahan, dimana struktur masyarakat yang feodal mendominasi kehidupan masa itu.

b. Kota-kota klasik (600 SM – 6 M)

Di Yunani pada abad 6 sebelum Masehi muncul sistem sosial baru, yaitu dari oligarki ke sistem demokrasi (Short, 1984). Para pemikir dan profesional menempati posisi penting dalam pemerintahan, disamping pemangku agama. Pemikiran mengenai kota ideal muncul di era ini. Kota dibangun lebih sistemik, mengikuti hasil pemikiran para ahli dan pemikir. Tetapi secara umum, struktur kota tidak berubah, yaitu konsentris. Pola tersebut diteruskan oleh Kerajaan Romawi, yang kemudian menjadi acuan pembangunan kota-kota di abad pertengahan (Sjoberg, 1960).

c. Kota-kota dagang/prad industri (6 M – 17 M)

Di era perdagangan antar benua (kolonialisasi), perkembangan kota sangat erat kaitannya dengan dinamika kegiatan perdagangan. Dengan terbukanya pola perdagangan antar benua, maka terjadi perubahan pola perdagangan. Pada abad 10 dan 11 Masehi, Venesia adalah kota dagang utama di Eropa, tetapi pada abad 17 dan 18, Bristol berkembang sebagai pelabuhan dagang utama di Inggris, London menjadi kota dunia di belahan barat Atlantik. Sementara itu, Venesia menjadi kota budaya dan seni sebagai daya tariknya, bukan lagi perdagangan. (Short, 1984).

Meningkatnya kekayaan karena kegiatan perdagangan ini telah mendorong perkembangan internal kota, yang ditandai oleh penambahan penduduk dan munculnya spesialisasi fungsi dalam pekerjaan. Contoh kota yang mengalami proses perkembangan cepat antara abad 13–18 adalah Amsterdam, Bruges, Venesia, Antwerpen dan Genoa (Bounds, 2004). Kota-kota tersebut secara struktural telah bergeser dari konsentrik menjadi sektoral, karena segregasi ruang tidak semata-mata karena pelapisan sosial, tetapi juga karena adanya diversifikasi kerja dan nilai tanah. Tanah di perkotaan menjadi komoditi penting, terjadi pola spesialisasi penggunaan tanah berdasar nilai sewa tanahnya.

d. Kota-kota industri (18 M – 19 M)

Sebagaimana diuraikan di depan, kota dagang adalah permulaan dari berkembangnya kota industri, yang merupakan proses tak terpisahkan dengan revolusi industri. Kegiatan industri

pada hakikatnya adalah aglomerasi kapital, tenaga kerja dan material. Aglomerasi ketiga sumberdaya tersebut telah membangkitkan proses urbanisasi yang luar biasa. Contoh proses urbanisasi yang luar biasa adalah Manchester. Pada tahun 1760, Manchester hanya kota kecil dengan penduduk 17.000 jiwa, kemudian bertambah menjadi 180.000 jiwa pada tahun 1830 dan 20 tahun kemudian menjadi 303.382 jiwa (Short, 1984). Kecepatan perkembangan yang luar biasa tersebut tidak diikuti oleh perkembangan layanan infrastrukturnya. Akibatnya, kota-kota industri di Inggris (dan kota-kota industri lain di Eropa) tumbuh sebagai kota yang jauh dari memenuhi syarat, khususnya kesehatan. Urbanisasi yang luar biasa juga mendorong disparitas yang semakin lebar antara industriawan dan pengusaha dengan kalangan pekerja. Struktur kotanya bergeser dari sistemik ke organik. (Short, 1984).

e. Kota-kota kontemporer (19 M – sekarang)

Perkembangan kota setelah kota industri secara prinsip menunjukkan gejala yang sama dengan periode sebelumnya. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi berimplikasi langsung terhadap perubahan fisik kotanya. Kota semakin memperlihatkan cirinya sebagai titik aglomerasi ekonomi. Teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan perkembangan perkotaan yang lebih merata. Perkembangan kawasan pinggiran kota atau sub urban menjadi fenomena penting, khususnya di Amerika (Short, 1984; Champion, 2001).

Di Indonesia, kaitan antara perkembangan budaya dengan wujud kotanya periodisasinya mengikuti pola di atas, dengan ritme yang lebih lamban sebagai akibat dari proses kolonialisasi. Sampai abad 19, periode kota dagang dan industri sama sekali tidak terjadi di Indonesia. Manfaat dari perkembangan perdagangan dan industri sepenuhnya dinikmati negara penjajah. Kota-kota di Indonesia perkembangannya tidak lepas dari pengaruh budaya penjajah. Oleh karena itu, kota-kota yang menjadi bagian dari sistem kolonisasi akan mempunyai 3 wajah, wajah yang dipengaruhi budaya Eropa, wajah budaya pribumi dan wajah campuran (Nas, 2007). Sebelum proses kolonisasi di abad 16, pola kota di Indonesia oleh Nas dikelompokkan dalam 2 variabel pokok, yaitu geografis dan pemerintahan. Geografis ditandai oleh pantai dan pedalaman, pemerintahan ditandai oleh kraton (kerajaan) dan tidak ada kraton (perdagangan).

Dari kajian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perkembangan kota sebagai proses perkembangan budaya dan peradaban telah meninggalkan jejak-jejak dalam bentuk tata ruang kota. Bentuk tersebut merupakan tanda-tanda visual kota, seperti monumen, lapangan, istana, jaringan infrastruktur dan penanda fisik lainnya. Tanda-tanda kota tersebut oleh Kevin Lynch (1960) dikelompokkan sebagai *landmark*, *path*, *node*, *district* dan *edge*, yang dijadikan instrumen untuk menandai citra kota.

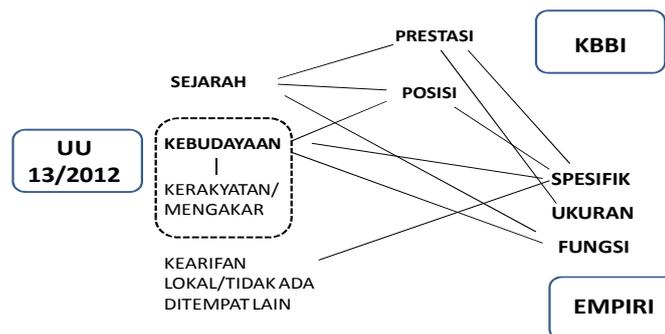
Kriteria Budaya Sebagai Penanda Keistimewaan Tata Ruang Kota.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa komponen ruang kota, baik itu penanda fisik (bangunan, monumen, jalan, dsb) maupun fungsi dan konfigurasi ruang kota adalah tanda-tanda peradaban/budaya yang mewujudkan (*tangible*). Sejalan dengan perjalanan waktu, perkembangan budaya kota membentuk lapisan-lapisan ruang kota setiap periodenya. Bisa dikatakan perjalanan budaya penduduk kota akan “terpetakan” dalam tata ruang kotanya. Lapisan-lapisan tersebut adalah komponen kota yang bisa dinyatakan sebagai penanda penting suatu kota. Di Indonesia, budaya dan tata ruang tersebut erat kaitannya dengan keberadaan “kraton” dan posisi geografis dari kota. Nas mengklasifikasikan kota di Indonesia berdasarkan kedua variabel tersebut. Kota yang berorientasi budaya kraton dan bukan serta budaya pedalaman (petani) dengan pantai (pedagang) (Nas, 2007).

Bagi Yogyakarta, sebuah kota kecil di pedalaman Jawa, keistimewaan tata ruang kota sebagai wujud budaya memerlukan kriteria yang jelas, karena budaya Jawa bukan hanya di Yogyakarta. Dalam UU Nomor 13/2012 tentang keistimewaan Yogyakarta, penanda keistimewaan harus memenuhi kriteria sejarah, lokalitas dan mengakar (Lay, C dkk, 2010). Dalam tataran operasional, ketentuan tersebut membutuhkan kriteria tambahan, sehingga “gelar” keistimewaan tersebut dapat dipersandingkan dengan kota-kota istimewa di tempat lain.⁷ Tambahan kriteria tersebut dibutuhkan untuk menguatkan “keaslian” dan “keunikan” komponen ruang kota yang menjadi penanda keistimewaan. Kriteria tersebut merujuk pada pengertian keistimewaan yang tercantum dalam KBBI daring 2014, yaitu sesuatu yang luar biasa, hanya satu-satunya atau tak ada yang menyamai dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, keistimewaan selalu dikaitkan dengan prestasi atau kejadian luar biasa.

Berdasar uraian di atas, diperoleh 3 sumber kriteria untuk mengenali penanda keistimewaan kota Yogyakarta, yaitu kriteria empiris berdasarkan deskripsi kota-kota istimewa yang ada, kriteria berdasarkan UU 13/2012, dan kriteria berdasarkan KBBI. Untuk mengintegrasikan berbagai kriteria tersebut, digunakan teknik penjodohan sebagai berikut.

PENJODOHAN KRITERIA KEISTIMEWAAN



Gambar 2. Skema Analisis Penjodohan Kriteria Keistimewaan Tata Ruang

Dari analisis penjodohan tersebut, maka kriteria teoritis keistimewaan tata ruang kota akan mencakup faktor sejarah (terkait peristiwa-peristiwa istimewa), budaya (terkait proses budaya bernilai tinggi dalam perkembangan peradaban manusia), posisi (orisinal, inovatif dan kreatif), fungsi/peran (menjadi acuan).⁸

⁷ Dalam laman Eunza Palace, Iza (2012) mengunggah nama kota-kota yang diklasifikasikan sebagai kota istimewa didunia. Kota-kota yang dinilai istimewa antara lain kota Hum di Kroasia, yang penduduknya hanya 23 orang (kota terkecil didunia). Kemudian Tokyo, kota terpadat, oleh Mount Issa di Queensland (Kota terluas), Potosi di Bolivia tertinggi dan terendah Yerikho, di Governorat, dekat sungai Yordan. Kota ini sekaligus juga menyandang predikat kota tertua (umurnya ditaksir 10.000 tahun).

⁸ Analisis penjodohan adalah proses penstrukturan variabel penelitian, mengacu analisis Hermeneutik Struktural Gadamer. Hermeneutik Struktural oleh Ricoeur diletakkan sebagai tahap 2 analisis Hermeneutik. (Richard E Palmer dalam bukunya *Hermeneutics*, Northwestern University Press, 1969).

Temuan dan Pembahasan

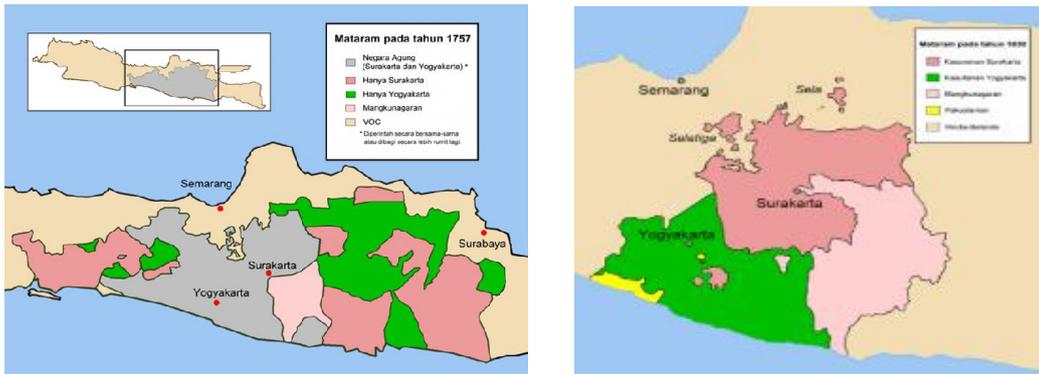
Gambaran Umum Perkembangan Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dibangun oleh HB I pada tahun 1755, bertepatan dengan hari Kamis Paing, 13 Suro, Jimakir 1682 atau 7 Oktober 1756 (Darmosugito, 1956). Letaknya membentang di antara $110^{\circ}24'19''$ sampai $110^{\circ}28'53''$ BT dan $07^{\circ}15'24''$ sampai $07^{\circ}49'26''$ LS. Lokasi tersebut berada di antara Gunung Merapi dan Lautan Hindia, dan diapit 6 sungai (Sungai Progo, Bedog, Winongo di barat dan Code, Gajah Wong dan Opak di timur). Menurut ahli perhitungan (*petung/primbon*) Jawa, lokasi tersebut dinilai sebagai lokasi yang istimewa, karena memenuhi syarat-syarat sebagai kedudukan ibu kota kerajaan (Revianto dan Sri Suwito, 2008). Bukti bahwa lokasi tersebut istimewa ditandai dengan padatnya situs-situs budaya dan sebaran permukiman sejak dulu, seperti terlihat dalam gambar 4. Bentang medannya berada pada kisaran lereng 3% dan relatif rata, dengan ketinggian di kisaran 114 mdpl. Tanah di lokasi tersebut juga mempunyai tingkat kesuburan tinggi, karena merupakan dataran alluvial yang kaya dengan unsur hara. Berdasarkan wilayah administratif, kotaYogya dikelilingi oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman di sebelah utara dan Kabupaten Bantul di sebelah selatan.

Perkembangan Pemerintahan, Sosial dan Perekonomian.

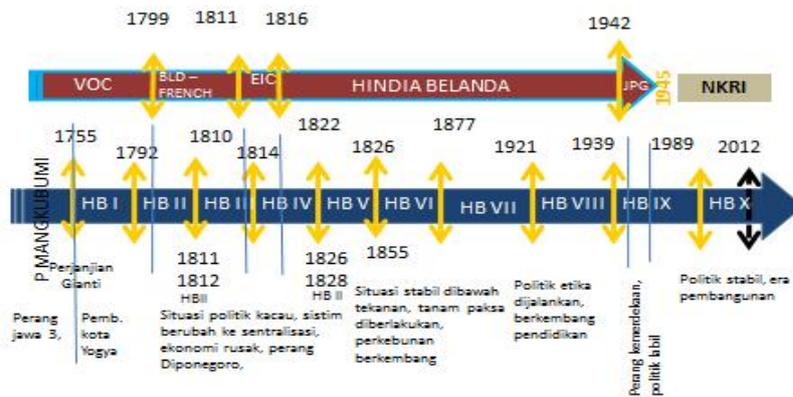
Berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta ditetapkan berdasar perjanjian antara P. Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC yang diwakili oleh Nicholas Hartingh di Giyanti, 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut menyepakati pembagian kerajaan Mataram menjadi 2, di bawah Pakubuwono III dan Mangkubumi. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Mangkubumi menamakan wilayah kekuasaannya dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayahnya membawahi 33.950 cacah di wilayah mancanegara (sebagian besar ada di wilayah timur Mataram/Jawa Timur) dan 53.100 cacah di wilayah pusat (Negoro Gung; Kedu, Mataram, Bagelen, Pajang, Sokowati) (Ricklefs, 1974). Sesudah perang Diponegoro, wilayah Monconegoro diminta VOC, sehingga wilayah Kesultanan Yogyakarta hanya tinggal seperti sekarang (Sejarah DIY, 1987). Secara kronologis, urutan Sultan Yogya dapat dilihat pada gambar 5.

Sebagai kota ibukota Negara, Yogya disebut *Kutho Negoro*. Ibukota negara ini di bawah pemerintahan Sultan langsung. Sultan adalah penguasa tunggal, pusat dari kegiatan sosio kultural, sebagaimana ciri sistem pemerintahan otkratis/theokratis. Pada era ini, kesultanan mempunyai 2 sub sistem pemerintahan, yaitu Parentah Jero (dalam), yang mengurus rumah tangga kraton dan berbagai ritual budaya kesultanan serta Parentah Jobo (luar) yang mengurus persoalan pemerintahan kesultanan diluar kraton. Kuatnya kekuasaan kraton menunjukkan kuatnya budaya feodal di masyarakat Yogyakarta masa itu.



Gambar 4: Wilayah Mataram saat Perjanjian Gianti (1755, kiri) dan Mataram setelah 1830 (perang Diponegoro, kanan).
Sumber: Sejarah DIY, 1987.

SEJARAH PENGUSAHA YOGYAKARTA



Gambar 5: Timeline Pemerintahan Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat
Sumber: Darnosugito, 1956, Depdikbud, 1977.

Sampai awal abad 20 atau sampai pemerintahan HB VIII (era kolonial), masyarakat Yogyakarta masih berbudaya tradisional feodal (Sumardjan, 1962). Konsep feodal yang membentuk piramida kekuasaan dan berorientasi memusat (konsentris) tersebut diwujudkan dalam tata ruang wilayah oleh HB I. Kraton adalah pusat pusaran kekuasaan, tempat tinggal sultan dan keluarganya serta beberapa kantor pangeran. Lapisan kedua adalah ibukota atau *kutho negara*. Di kota negara tinggal kaum bangsawan dengan jabatan tinggi. Lapis berikutnya disebut *negorogung* atau *negoro agung*, di wilayah ini terletak kepentingan kebendaan para bangsawan. Mereka disebut *patuh*, dimana berlaku ketentuan bahwa patuh tidak boleh tinggal di wilayah lunggunnya, tetapi harus di *kutho negoro*. Dengan demikian Sultan bisa mengawasi langsung aktivitas para patuh. Lapis terluar disebut *monconegoro*, yaitu wilayah yang tidak langsung “terawasi” Sultan, karena letaknya yang jauh dari pusat kerajaan. Wilayah ini tidak langsung dikuasai, tetapi mengakui kekuasaan Sultan. Karena lokasinya yang jauh, maka merupakan daerah yang paling lemah ikatannya dengan Kesultanan (Sumardjan, 1962).



Gambar 6: Struktur Sosial Masyarakat Jawa di Era Kolonial

Di samping kelas-kelas sosial tersebut di atas, di era kolonial juga muncul kelas-kelas lain yang sejajar. Kelas tersebut dibentuk oleh keberadaan orang-orang asing di Yogyakarta. Pejabat tinggi Belanda dan pemilik usaha perkebunan berkedudukan setara dengan para bangsawan. Di bawah para pejabat yang berkebangsaan Belanda, terdapat kelas menengah yang sejajar dengan para priyayi, yaitu penduduk pribumi yang bekerja di kantor atau perusahaan Belanda. Situasi berhadapannya dua kelompok sosial tersebut oleh PJM Nas disebut sebagai dualisme kehidupan kota-kota kolonial di wilayah Hindia Belanda (Nas dan Boender, 2002; Marcussen, L, 1990).



Gambar 7. Piramida Dualisme Kehidupan Sosial Kota Kolonial di Jawa

Struktur sosial tersebut berubah sejak pemerintahan HB IX. Jabatan patih dihapus, urusan luar langsung dipegang Sultan dan beliau berkantor di Kepatihan. Dengan keputusan tersebut, Sultan telah menghapus feodalisme, mengganti dengan pemerintahan yang demokratis (Sumardjan, 1962).

Kehidupan perekonomian masyarakat di era pemerintahan kerajaan Jawa sepenuhnya diperuntukkan bagi Raja. Mereka yang tinggal di wilayah kesultanan hanya bisa mengerjakan tanah atas persetujuan Sultan, lewat patuh. Di awal abad 20, di sekitar Yogya terdapat 17 pabrik gula dan beberapa pabrik rokok. Adanya kegiatan perkebunan gula dan tembakau tersebut telah membangkitkan perekonomian di kota, yang ditandai dengan berkembangnya berbagai kegiatan, seperti perhotelan, industri peralatan pertanian, pendidikan dan transportasi. Infrastruktur tersebut sebagian besar untuk mendukung industri gula.

Walaupun ada perubahan di sektor ekonomi dan budaya, tata ruang kotanya sampai awal abad 20 tidak berubah. Perubahan yang terjadi tidak cukup kuat untuk merubah tata ruang kota yang diciptakan oleh HB I. Pembangunan yang terjadi mengisi ruang-ruang yang seakan akan disiapkan oleh HB I, yaitu ruang yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah Belanda, di bagian utara kota. Dibagian selatan kota, yang didominasi oleh budaya yang berorientasi kraton, hampir tidak ada perubahan tata ruang kotanya.⁹

Perkembangan Luas Area Perkotaan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Kajian mengenai perkembangan luas area ini terutama bersumber dari hasil pengukuran Agus Suryanto (2002) dengan menggunakan interpretasi foto udara. Perkembangan luas area perkotaan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Luas dan Kecepatan Pemekaran Fisik Kota Yogyakarta Tahun 1756-1996

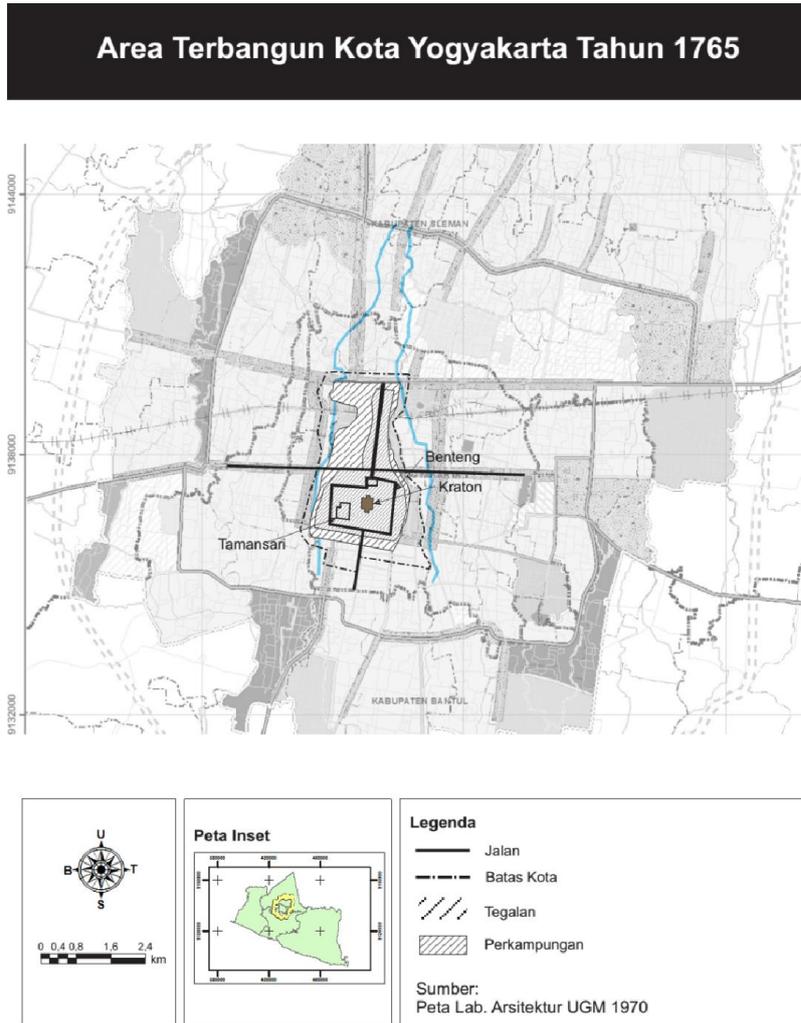
Tahun	Luas (ha)	Pemekaran fisik Kota					
		Periode Waktu	Rentang (Th)	Pertambahan luas		Kelipatan	Kecepatan mekar/th
				(Ha)	%		
1756	359,55						
1824	1124,14	1756 - 1824	68	764,59	212,652	3,13	11,24
1959	1884,83	1824 - 1959	135	760,69	211,567	5,24	5,63
1972	2636,42	1959 - 1972	13	751,59	209,036	7,33	57,81
1987	4662,21	1972 - 1987	15	2025,79	563,424	12,97	135,05
1996	6687,99	1987 - 1996	9	2025,78	563,421	18,60	225,09

Sumber: Suryanto, 2002

Sebelum kemerdekaan, wilayah administratif kota Yogya belum definitif, karena kota Yogya bukan *gemintee* (kota otonom). Sejak dibentuknya *Haminte* Kota Yogyakarta pada tahun 1947, maka wilayah kota Yogyakarta mencakup 14 Kemantren/Kecamatan seperti saat ini. Jika menggunakan batas wilayah administratif saat ini, maka luas wilayah perkotaan pada tahun 1987 sudah melampaui luas wilayah administratif kota Yogya, yang hanya 3.250 Ha.¹⁰

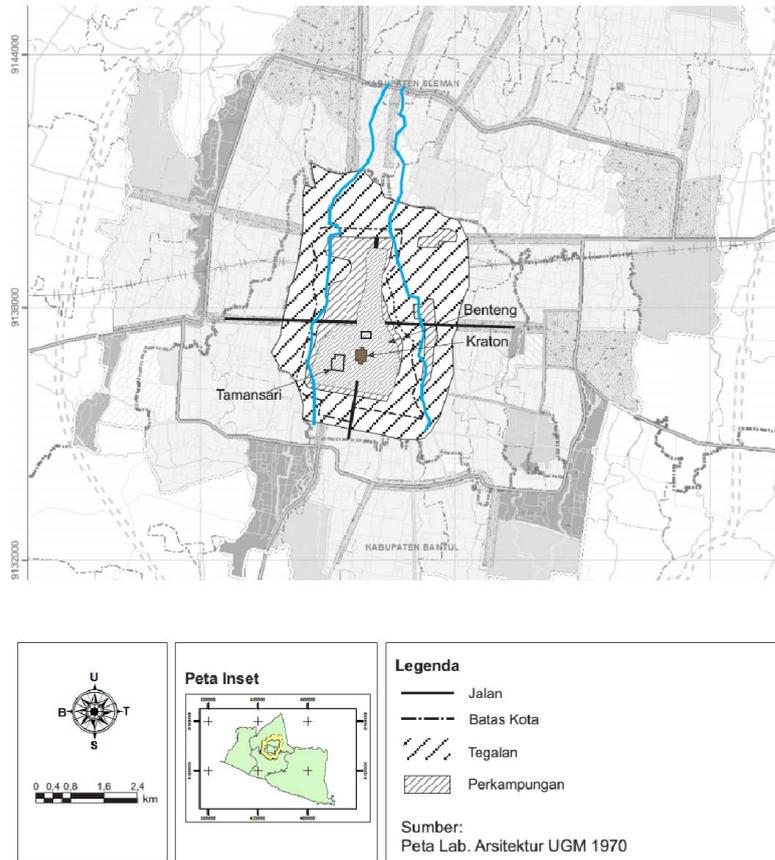
⁹ Laporan Penelitian Awal Tata Kota Yogyakarta 1970; Penelitian ini adalah produk kajian Tata Ruang Kota yang termasuk awal di Indonesia. Penelitian ini dipimpin oleh Romo YB. Mangunwidjojo, dengan dukungan berbagai disiplin ilmu di UGM. Penelitian ini boleh dikatakan murni penekatan akademik, karena pada saat itu (1970-an) belum ada ketentuan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977: *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Jakarta.



Gambar 8. Peta Area Terbangun Kota Yogyakarta Tahun 1765

Area Terbangun Kota Yogyakarta Tahun 1790



Gambar 9. Peta Area Terbangun Kota Yogyakarta Tahun 1790

Konsep Konsep Budaya Pembentuk Ruang Kota.

HB I membangun Yogyakarta berdasar konsep-konsep sosial, kenegaraan dan fungsional. Konsep-konsep yang diwujudkan dalam struktur, pola ruang dan citra kota adalah sebagai berikut :

- Konsep Catur Sagotra¹¹

Catur Sagotra atau Catur Gotro Tunggal merupakan konsep kosmologi Jawa, yaitu pemikiran tentang teranyamnya 4 komponen kehidupan dalam satu kesatuan ruang. Konsep tersebut merupakan gambaran kondisi yang harmonis dari alam semesta, yaitu terintegrasinya mikrokosmos dan makrokosmos dalam satuan ruang kehidupan. Keempat gotro (masa) tersebut dalam posisi arah jarum jam adalah kraton, masjid gede, pasar dan alun-alun.

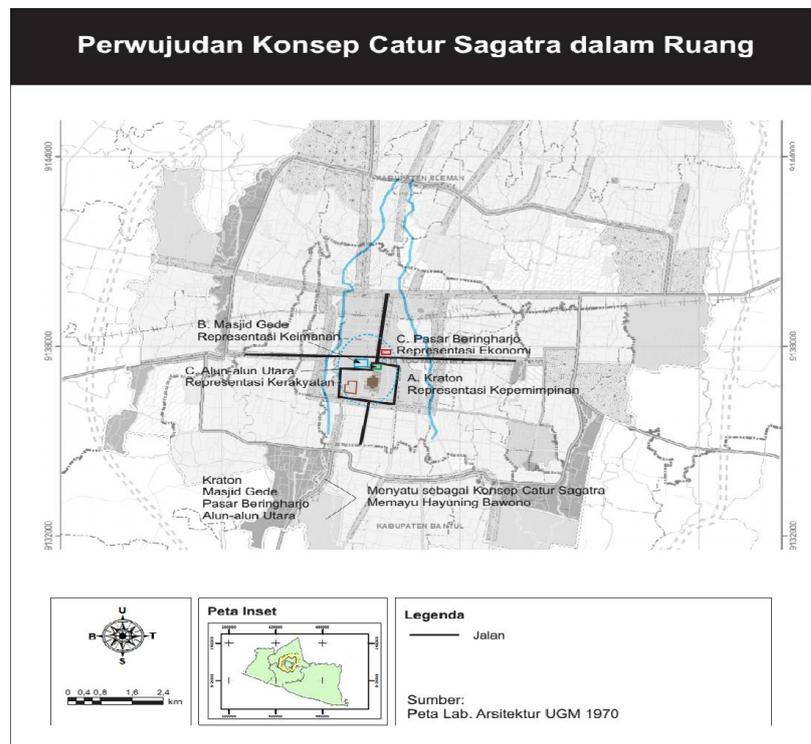
¹¹ Hamengku Buwono IX, 2013: *Catur Sagotra*. Pidato Pengukuhan Yayasan Catur Sagotra Nusantara, Jakarta.

Keempat komponen tersebut menyatu dalam satu kawasan, dihubungkan oleh ruang jalan, berfungsi sebagai inti kota. Keempat komponen tadi mewakili fungsi-fungsi penting dalam kehidupan kota, yaitu pemerintahan/pemimpin (kraton), religi, etika dan moral (masjid), ekonomi (pasar) dan budaya (alun-alun).

- Konsep Golong Gilig; Sawiji, Greget, Sengguh Ora Mingkuh; Manunggaling Kawulo Gusti; Sangkan Paraning Dumadi;

Golong gilig secara harafiah berarti sesuatu yang utuh, menyiratkan semangat dan niat yang satu atau menyatukan semua golongan. Konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk tugu (obelisk) Golong gilig, diletakkan pada garis lurus imajiner dari kraton ke puncak Merapi, berjarak 2,5 km dari kraton. Antara kraton dan tugu dihubungkan oleh jalan lurus, yang diberi nama *Margo Utomo*, Malioboro (Mali-obor-o/ memakai obor), dan *Margo Mulyo*. Nama-nama tersebut menyiratkan hubungan antara cita-cita mulia harus ditempuh dengan cara yang mulia, untuk menuju keutamaan, dengan bekal ilmu pengetahuan ajaran para wali dan leluhur. Tugu atau yoni di utara adalah simbolisasi satu tujuan, *sawiji*, yang tidak akan bergeser walaupun banyak rintangan (*sengguh, ora mingkuh*). Di bagian selatan, dalam garis lurus Merapi-Tugu-Kraton dibangun panggung untuk mengamati binatang buruan di Hutan Krapyak yang berbentuk lingga. Sumbu utama tersebut membentuk kesatuan simbol lingga – yoni (*Purusha dan Pacitry*), sebagai wujud konsep *manunggaling kawulo gusti*.

Konsep Sangkan Paraning Dumadi, merupakan pesan moral untuk tidak lupa diri, pengingat bahwa kehidupan itu berasal dari Allah kembali ke Allah (Brongtodiningrat, 1978). Konsep tersebut diwujudkan dalam simbol-simbol ruang dan citra kota di sepanjang poros Tugu-Kraton-Panggung Krapyak (Revianto & Yuwono, 2010).



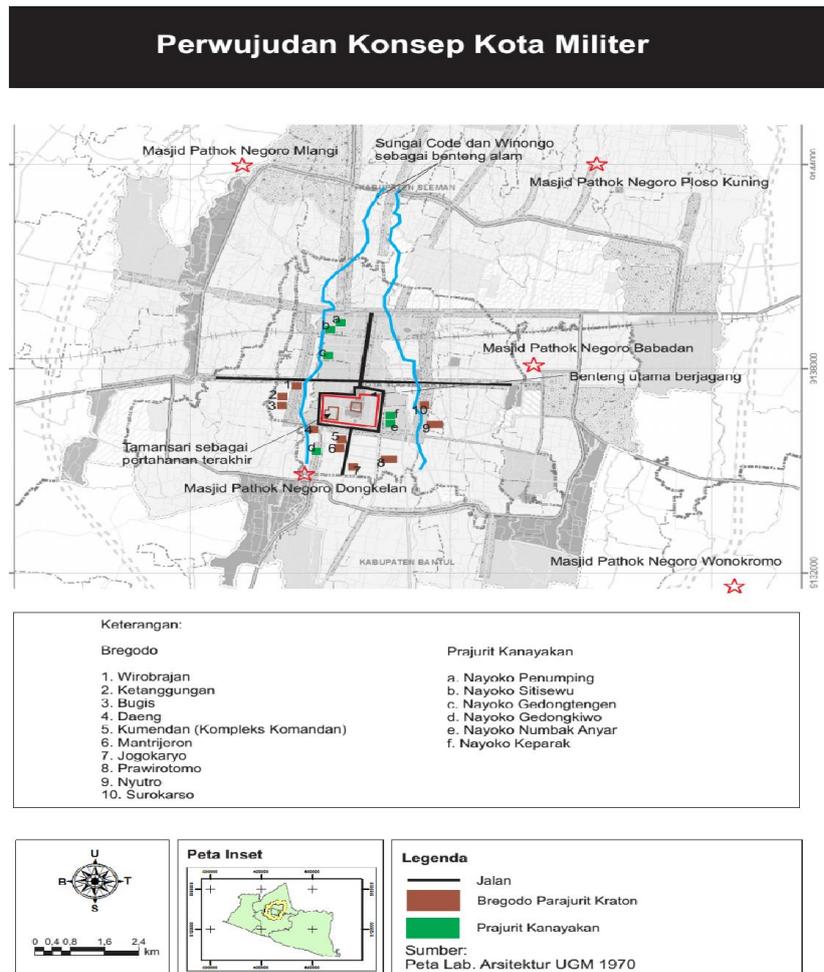
Gambar 10. Peta Perwujudan Konsep Catur Sagatra dalam Ruang

- Konsep Pengendalian Pemerintahan dan Pertahanan Kota.

Pangeran Mangkubumi sangat sadar bahwa sumber kekuatan utama lahiriah dalam memimpin negara adalah loyalitas *sentono dalem* dan ulama dengan santrinya (Ricklefs, 1974). Oleh karena itu sangat penting untuk mengakomodasi kepentingan/kebutuhan para *sentono* dan ulama, sebagai strategi pengendalian. Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk alokasi atau distribusi fungsi ruang dalam wilayah kesultanan. Untuk memperoleh loyalitas, para pangeran dan abdi yang berjasa *diganjar tanah lungguh (apanage)*. Tetapi para pangeran/pejabat pemegang tanah *lungguh* harus tinggal di wilayah Kutho Negoro, untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan (Sumardjan, 1962).

Di samping penempatan para pemegang tanah *lungguh* dan alokasi tanah *lungguhnya*, HB I juga menciptakan konsep *Masjid Pathok Negoro*. Konsep tersebut adalah strategi untuk memperoleh dukungan dari ulama dan santrinya. Dari sudut pandang politik kenegaraan, konsep masjid Pathok Negoro adalah sebagai bagian dari strategi HB I untuk mengelola kekuatan-kekuatan yang mendukung tegaknya negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari sudut budaya, struktur tersebut menggambarkan konsep *Mandala*. (harmoni pusat pinggir, konsep *keblat papat limo pancar*).

Kota Yogyakarta dibangun dalam situasi yang rawan ancaman peperangan dari ke 4 kekuatan yang bersaing, Surakarta, Yogyakarta, Mas Said dan VOC. (Ricklefs, 1974). Pengalaman Sultan HB I, sebagai seorang panglima perang sangat menentukan konsep pembangunan kota Yogyakarta. (Darmosugito, 1956). Oleh karena itu, faktor pertahanan pertimbangan utama. Indikatornya adalah dibangunnya benteng di sekeliling kawasan kraton. Benteng selebar 4-6 meter, tinggi 6-8 meter berbentuk bujur sangkar adalah konsep baru Tata Ruang kota di Jawa. Bangunan benteng yang dilengkapi dengan selokan (*jagang*) tersebut adalah tembok pertahanan, mirip dengan tembok-tembok kota di Eropa. Bangunan tersebut adalah satu-satunya sistem pertahanan kota kerajaan di Jawa. Kemudian di dalam benteng, dibangun Taman Sari (istana air), yang diperkirakan selain tempat rekreasi merangkap benteng pertahanan terakhir (Darmosugito, 1956). Di luar benteng, HB I menempatkan 9 *bergodo* (batalion) di selatan kota atau di belakang dan di samping benteng Kraton (posisi benteng menghadap utara). Sebaran lokasi kampung prajurit tersebut, jika diposisikan dengan lokasi kraton menggambarkan gelar perang tradisional Jawa seperti di pewayangan, yaitu gelar *Garudo Nglayang* atau *Sapit Urang*. Kemudian di lingkaran paling luar adalah kawasan Masjid Pathok Negoro, yang diperkirakan merupakan pertahanan terluar dari sistem pertahanan ibukota kerajaan. Pola ruang yang menggambarkan konsep kota militer tersebut, ada di buku *Silpha Sastra Manasara* (Acharya PK, 1981).



Gambar 11. Peta Perwujudan Konsep Kota Militer

Kedudukan Yogyakarta sebagai negara *vassal* mewajibkan untuk memenuhi kebutuhan Belanda, sesuai kontrak politik dengan Belanda (Ricklefs, 1974; Sumardjan, 1962; Purwokusumo, 1985). Pengaruh politik Belanda nampak jelas dalam tata ruang kota Yogya, dengan ditematkannya 2 kepentingan Belanda, yaitu fasilitas militer (Beteng Vredeburg) dan pemerintahan (Loji Kebon), yang dibangun tepat di depan “halaman luar” atau alun-alun utara. Di samping fasilitas militer dan pemerintahan, Belanda juga membangun berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan tentara dan pegawai pemerintahnya, seperti perumahan, yang ada di sekitar Beteng (Loji Kecil) dan bagian selatan beteng (Secodiningratan), Gereja Ngejaman dan fasilitas lainnya di sekitar Loji kecil dan Loji Kebon, kemudian kawasan Bintaran, Jetis dan Kota Baru.

Budaya Sebagai Penanda Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Salah satu dasar dalam penentuan obyek keistimewaan adalah ketentuan dalam UU Nomor 26/2007, yaitu struktur dan pemanfaatan ruang kota. Atas dasar uraian di atas, secara garis besar, tata ruang kota yang akan dinilai keistimewaannya dari aspek budaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2A. Komponen Struktur Ruang kota sebagai penanda Keistimewaan.

Unsur	Penanda / Komponen	Uraian
Struktur Ruang kota	<ul style="list-style-type: none"> - Poros Tugu – Kraton – Panggung Krapyak. - Bangunan catur sagotra. - Loji Gede, loji kebon, gereja. 	Sumbu Tugu – Kraton – Panggung krapyak dengan bangunan catur sagotra adalah penanda utama kota Yogya, karena merupakan representasi konsep budaya memayu hayuning bawono. Di sumbu tersebut juga berlokasi bangunan bangunan simbol kekuasaan Belanda, yaitu Loji Kebon (rumah residen) dan loji Gede (beteng vredenburg). Simbol kuasa Raja dan Kolonial menjadi satu, terintegrasi sebagai inti kota.
	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan catur sagotra. - Masjid Pathok Negoro. 	Kedua komponen kota tersebut membentuk konsep Mandala dan integrasi budaya Hindu – Budha dengan Islam. Konsep Pusat – Pinggiran, keblat papat limo pancer merupakan salah satu penciri struktur kota Yogya.
	Konfigurasi sumbu simetri dan mandala.	Jika penanda struktur tersebut disatukan, mencirikan struktur geometris memusat, yang menjadi ciri kota kerajaan di Eropa.

Sumber : Suryanto, 2015

Tabel 2 B. Komponen Pola Ruang kota sebagai penanda Keistimewaan.

Unsur	Penanda / Komponen	Uraian
Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan kampung prajurit. - Kawasan Jeron Beteng. - Kawasan Pathok Negoro 	Konfigurasi kawasan kawasan tersebut membentuk ciri kota militer, karena konfigurasi tersebut menggambarkan strategi pertahanan yang tersembunyi. Konfigurasi pola ruang tersebut juga merepresentasikan gelar Sultan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Malioboro - Kawasan Kampus UGM 	Kawasan Malioboro merupakan pusat kota lama padat dengan penanda budaya dan sejarah. Berkembang sebagai kawasan wisata utama kota, menjadi ikon budaya. Bulaksumur merupakan pusat kota baru, ada dipinggiran utara kota. Menjadi ikon pendidikan di Indonesia.

Sumber : Suryanto, 2015

Konsep kebudayaan yang mewujudkan dalam keruangan kota antara lain konsep *Memayu Hayuning Bawono*, *Manunggaling Kawulo Gusti*, *Sangkan Paraning Dumadi* dan *Pathok Negoro*. Kemudian sikap hidup yang mengakar dan tercermin dalam konsep *sawiji-greget-sungguh-oramingkuh*. Perwujudan konsep-konsep tersebut dalam tata ruang kota dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 3. Perwujudan Konsep Budaya dalam Tata Ruang Kota Yogya

Konsep budaya	Wujud dalam ruang kota	Evaluasi
Memayu Hayuning Bawono	Catur Gotro Tunggal atau Caturgotro, Jalinan 4 Ikon kotaYogya: Kraton – Masjid Gede – PasarGede – Alun-alun.	<i>Catur gotro tunggal</i> adalah konsep kosmologi jawa, yaitu harmoni mikro dan makro kosmos. Kraton sebagai pemimpin, masjid sebagai agama, pasar sebagai kegiatan ekonomi dan alun-alun merefleksikan budaya. Pola kepemimpinan yang mengacu pada religi, ekonomi dan budaya merupakan cerminan dari konsep <i>memayu hayuning bawono</i> , yang saat ini dikenal sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan (HB X, 2012)
Manunggaling Gusti Kawulo	MonumenTugu – Kraton – Panggung Krapyak dan sumbu pengikatnya. Tugu Golog – Gilig.	Tugu Golong-gilig, Kraton dan Panggung Krapyak yang disatukanoleh poros utara-selatan, menggambarkan bersatunya pemimpin dan rakyat (Darmosugito, 1956). Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini mewujud dalam pola hidup <i>gotong royong</i> .
Sangkan Paraning Dumadi	Poros Tugu – Kraton – Panggung Krapyak.	Konsep ini merupakan salah satu patron umum dalam budaya jawa, simbiosis dari ajaran Hindu-Budha dan Islam .Yang khusus dan tidak ada duanya adalah upaya mewujudkan konsep yang <i>intangible</i> menjadi <i>tangible</i> . Upaya tersebut berupa memberi nama jalan, menanam jenis tanaman tertentu serta melaksanakan seremonial tertentu . (Yuwono, 2010).
Sawiji – greget – sengguh ora mingkuh	Konfigurasi ruang: beteng kraton dan kampung-kampung prajurit yang berada dibelakangnya, membentuk pola gelar perang tradisional tertentu.	<i>Sawiji, greget, sengguh ora mingkuh</i> adalah sifat ksatria Mataram. Konfigurasi ruang kawasan Jeron Beteng dan kampung prajurit menggambarkan prinsip tersebut. Kedudukan Kraton, yang merepresentasikan Sultan sebagai <i>Senopati Ing Ngalogo</i> (diujung gelar, bukan didalam). Sultan sebagai panglima harus berada didepan, memimpin dan memberi contoh, seperti sifat P. Mangkubumi (Ricklefs, 2002).

Sumber: Suryanto, 2015.

Struktur dan pola ruang yang terbentuk oleh komponen-komponen ruang yang merupakan simbolisasi konsep-konsep budaya tersebut, mengarah pada tipe tertentu dari citra kota, yaitu citra monumental dan pertahanan. Penyatuan kedua konsep tersebut, banyak ditemui di India (*durga atau skandhavara*) dan Eropa (*bastides*). Di Indonesia, kota benteng sekaligus monumental adalah kota-kota pantai, yang memang disiapkan untuk menghadapi musuh dari luar (Banten, Batavia, Makasar). Kota pedalaman yang dibangun dengan konsep tersebut hanya Yogyakarta.

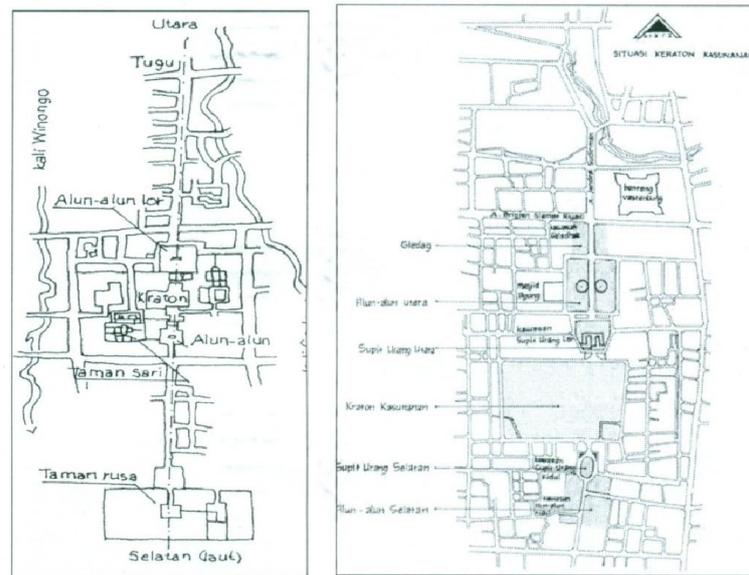
Penanda lain yang menguatkan Yogya dibangun atas dasar konsep sosio kultural dan religi adalah keberadaan Masjid Pathok Negoro. Masjid tersebut berada di empat penjurug pinggir *Kutho Negoro* (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan dan Dongkelan). Sebutan dan lokasi 4 masjid tersebut secara eksplisit mendudukan fungsi dari agama Islam, sebagai sandaran kekuatan Negara. Pathok bukan hanya batas, tetapi tonggak pengikat supaya bangunan kuat berdiri. Masjid pathok negoro sebagai *keblat papat* dan masjid Gede Kauman sebagai *pancer* nya. Struktur tersebut hanya ada di Yogya, tidak ditemui di kota-kota lain di Indonesia.

Tabel 4. Analisis Keistimewaan Struktur Ruang Kota Yogyakarta dalam Aspek Kebudayaan

Penanda (wujud)	Petanda (Konsep)	Semangat	Fungsi	Keteladanan
Poros Tugu – Kraton – Panggung Krapyak. Bangunan catur sagotra. Loji Gede, lojikebon, gereja.	Memayu Hayuning Bawono Manunggaling Kawulo Gusti Sangkan Paraning Dumadi Golong Gilig.	Konsep konsep tersebut adalah nilai nilai kejawen umum. Yang istimewa adalah perwujudannya, menyatu di poros Tugu-Kraton-Krapyak. Oleh karena itu poros tersebut disebut sumbu filosofi. Perwujudan tersebut merupakan pesan bagi masyarakat kota Yogya untuk selalu menjunjung spirit tersebut, yaitu <i>kemerdekaan /demokrasi-kerakyatan, persamaan / solidaritas - kemanusiaan, persatuan/ kebhinekaan – kebangsaan dan toleransi/ budaya – ketuhanan.</i>	Fungsi kawasan tersebut sebagai inti kota berhasil baik. Fungsi sebagai penanda dari petanda yang harus di hayati oleh warga Yogya terbukti saat perang kemerdekaan. Saat ini dengan perubahan tata kehidupan, fungsinya masih belum nampak.	Keteladanan bukan dari wujud fisiknya, tetapi HB I dan HB IX telah memaknai konsep konsep tersebut dengan tindakan yang tepat, sesuai jamannya. Pesan yang mewujudkan dan pelaksanaan dari pesan tersebut adalah nilai istimewa dari struktur kota Yogya.
Bangunan catur sagotra. Masjid Pathok Negoro	Sawiji – greget – sengguh ora mingkuh Manunggaling Kawulo Gusti Keblat papat limo pancer	Struktur tersebut adalah sebuah Pesan tentang Semangat dan sifat sifat seorang pemimpin/ksatria.	Pesan yang disampaikan tidak mudah ditangkap, karena ujudnya tersebar.	HB I dan HB IX adalah teladan dalam memaknai dan menjalankan pesan pesan tersebut.
Konfigurasi sumbu simetri dan mandala	Memayu Hayuning Bawono Menyatunya kosmologi budaya jawa.	Pesan tersebut adalah semangat yang ingin ditanamkan oleh P Mangkubumi kepenerusannya. Untuk selalu diingat, struktur ruang kota ditemplei pesan tersebut.	Sampai decade HB IX, fungsi struktur tersebut sebagai pengarah perkembangan kota berjalan baik. Sebagai penanda, hanya Yogya yang menyatukan fungsi budaya dalam struktur kota.	Keteladanan bisa dilihat dari dua aspek, pesan yang disampaikan dan ujud yang direalisasikan. Kesesuaian antara pesan dan ujud merupakan keistimewaan dari struktur ruang Yogya.

Sumber: Suryanto, 2015.

Dalam gambar di bawah, terlihat perbedaan Tata Ruang kota Yogyakarta dengan kota kota tua lain, seperti Surakarta, Bandung dan Malang. Menurut klasifikasi Nas, Bandung dan Malang tidak dalam kelompok yang sama dengan Yogyakarta, sehingga pasti berbeda. Yang ada dalam satu kelompok dengan Yogya adalah Surakarta, sama sama ibu kota kerajaan yang berlokasi di pedalaman (Nas, 2007). Kebetulan juga kedua kota tersebut dibangun oleh orang yang sama, yaitu Pangeran Mangkubumi. Tetapi kedua kota tersebut berbeda tata ruang kotanya (Ricklefs, 1974). Surakarta tidak mempunyai as yang kuat dan benteng kota.



Gambar 12. Skematik Pusat Kota Yogya dan Surakarta

Tabel 5. Kesamaan dan Perbedaan Struktur Kota Yogya dan Surakarta

Unsur Ruang Kota	Yogyakarta	Surakarta
Komponen Catur Sagotra	Ada, menyatu dalam kesatuan as Tugu Kraton.	Ada, tidak terikat dalam kesatuan ruang.
Struktur ruang	Poros kuat, simetris, <i>balance</i> . Memenuhi kaidah struktur ruang kota monumental. Struktur jelas, sebagai manifestasi dari konsep budaya catur sagotra	As pendek, asimetris, tidakimbang. Citra monumental hanya untuk kraton. Struktur kota tidak jelas konsepnya.
Pola Ruang	Sederhana, fleksibel. Pola grid hanya di dalam beteng.	Rumit, kaku. Pola grid hampir menyeluruh dipusat kota.

Dialog Teoritik

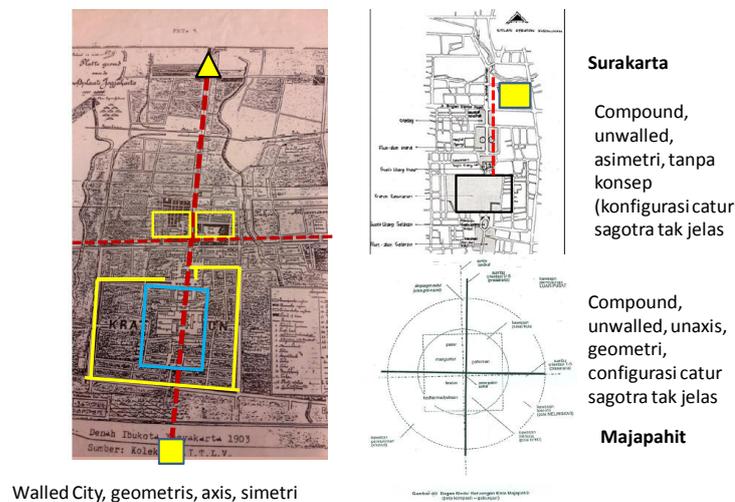
Posisi Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam Teori Struktur Kota; Konsep Unik Tata Ruang Kota di Indonesia.

Di Yogyakarta, struktur konsentris hanya terjadi pada wilayah negara, yaitu struktur Kerajaan Mataram sejak Senopati. Sebagai inti adalah Keraton, tempat tinggal raja, kemudian di lapis kedua adalah Kutho Negoro, dimana tinggal para pangeran (*patuh*), pemegang tanah tanah lungguh (*apanage*). Dalam wilayah kota (Kutho Negoro), walaupun sifat umum dari struktur ruang konsentris masih nampak, tetapi aspek lokalitasnya lebih kuat memperlihatkan kekhususan tata ruang kota Yogya, yang sekaligus menjadi ciri keistimewaan. Aspek lokalitas yang spesifik tersebut adalah struktur poros Tugu-Kraton-Panggung Krapyak dan

konfigurasi pola ruang kota militer/pertahanan, yang mewujud dalam bentuk benteng kraton dan sebaran kampung prajurit di luar beteng.

Di samping itu, dengan adanya warga negara asing, terjadi segregasi ruang kota berdasarkan pengelompokan sosial karena perbedaan ras dan kelas sosial. Menurut Nas (1986), pola ini adalah pola umum kota-kota kolonial, dimana segregasi sosial tersebut diikuti oleh segregasi fungsional. Segregasi fungsional tersebut ditandai oleh pisahnya pusat kota, dari penguasa pribumi ke Belanda (Bandung, Malang). Tetapi yang terjadi di Yogya, pusat kotanya tetap di sekitar poros Tugu-Kraton, dimana kekuasaan tradisional dan asing menyatu. Fenomena tersebut memperlihatkan kuatnya poros Tugu – Kraton sebagai inti kota Yogyakarta.

POSISI KOTA YOGYA DIANTARA IBU KOTA KERAJAN JAWA



Gambar 14. Posisi Yogya diantara ibu kota kerajaan Jawa.

Dalam tradisi ibu kota kerajaan, sejak Majapahit, Demak, Pajang, Kota Gede, Kartasura sampai Surakarta, kotanya membentuk struktur dan pola *compound*. Oleh karena itu banyak ahli dan peneliti yang percaya bahwa raja-raja Jawa selalu mengacu pada pola-pola yang menjadi peninggalan leluhurnya. Kota Yogyakarta satu-satunya kota kerajaan di Indonesia yang pusat kotanya mempunyai poros kuat, menghubungkan landmark kota, seperti kota-kota kerajaan abad pertengahan di Eropa. Oleh karena itu struktur poros secara fisik memenuhi syarat sebagai penanda keistimewaan.

Kesimpulan dan Saran

Warisan budaya yang mewujud sebagai komponen ruang kota penanda keistimewaan adalah yang berhubungan dengan konsep-konsep budaya yang “ditempelkan” pada ruang kota. Konsep kota yang monumental dan militeristik dibungkus dengan konsep budaya Jawa yang adi luhung. Konsep budaya tersebut adalah *Memayu Hayuning Bawono*, *Catur Sagotra*, *Sangkan paraning dumadi dan Golong – Gilig*, *Sawiji – greget – sengguh ora mingkuh*. Komponen ruang kota yang merupakan wujud konsep budaya tersebut adalah Sumbu Tugu – Kraton – Panggung Krapyak, Kawasan Malioboro, Kawasan Njeron Beteng. HB I adalah penguasa yang cerdas,

bisa dipastikan, bahwa penempelan konsep budaya tersebut pasti mempunyai tujuan tertentu, yang menarik untuk diteliti lebih jauh.

Ricklefs mendiskripsikan pribadi HB I (Pangeran Mangkubumi) sebagai pribadi yang Visioner, Cerdas, Tangguh dan sekaligus ahli melobi (sehingga disamakan dengan leluhurnya, Sultan Agung), adalah penguasa yang sangat memahami bagaimana memanipulasi kuasa raja untuk tujuan atau ambisinya. Atas dasar pemahaman tersebut, jika dikaitkan dengan situasi negeri Jawa pada saat itu (dimana masih terjadi persaingan dan konflik dengan Surakarta maupun Mangkunegaran), maka dengan analisis Hermeneutik (Ricoeur, 1981) dapat diperkirakan bahwa penempelan konsep-konsep budaya dalam wujud komponen ruang kota yang monumental tersebut bertujuan :

- Menunjukkan Kesultanan Yogyakarta adalah Kesultanan yang besar, tidak kalah dibanding kesunanan Surakarta yang lebih tua, sebagai sesama penguasa di Jawa.
- Membangkitkan kebanggaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Sultan dalam memimpin Negara Yogyakarta.
- Kebanggaan tersebut dibutuhkan untuk menangkal pengaruh Belanda yang semakin kuat.

Jika mengacu pada pendapat Lewis Mumford (1938) maupun Raymond William (1975), diperkirakan bahwa terkikisnya nilai-nilai dan semangat keistimewaan yang menjadi roh Yogya Istimewa adalah bagian dari proses perubahan budaya yang terjadi di Yogyakarta. Semakin heterogennya penduduk Yogya dan kuatnya pengaruh Globalisasi di satu sisi serta semakin berkurangnya pemahaman terhadap konsep-konsep budaya lokal yang adi luhung, adalah faktor-faktor yang potensial menggerus roh keistimewaan Yogyakarta. Dibutuhkan pemaknaan kembali terhadap konsep-konsep budaya tersebut, sebagaimana pernah dilakukan oleh HB IX dengan merangkum konsep-konsep tersebut dalam konsep tahta untuk rakyat pada waktu beliau bertakhta sebagai Sultan Yogyakarta (Suryanto, 2015). Jika tidak ada upaya pemaknaan kembali, maka penanda keistimewaan tersebut hanya akan bernilai sebagai peninggalan sejarah saja.

Dalam tataran konseptual, upaya pelestarian dan pewarisan budaya adi luhung tersebut sepenuhnya ada di *wong* (masyarakat lokal) Yogyakarta, untuk memaknai kembali roh keistimewaan yang mewujud dalam komponen ruang kota Yogyakarta. Dalam beberapa diskusi, pemaknaan kembali konsep budaya supaya sesuai dengan jamannya membutuhkan kreativitas untuk menyesuaikan hal hal positif dan keberanian untuk menolak hal hal negatif. Untuk menumbuhkan dan memelihara kemampuan kreativitas *wong* Yogya tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk berperan sebagaimana ajaran ki Hajar Dewantara, *Ing ngarso sung tulodo, ing tengah mangun karso* dan *tut wuri handayani*.

Dalam tataran operasional, hal mendesak adalah menjaga keberadaan dari wujud-wujud budaya tersebut dan menyebarkan pesan-pesan dari wujud-wujud tersebut. Upaya untuk menjaga sudah dilakukan, tetapi menyampaikan pesan-pesan yang tersirat dalam wujud tersebut belum ada. Banyak cara yang bisa dilakukan, baik melalui penjelasan *on site* maupun menyiapkan karya-karya dokumenter yang mampu memberikan pemahaman terhadap peristiwa atau pesan-pesan yang tersirat di dalam komponen maupun konfigurasi ruang kotanya ke masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Acharya, Prasanna K (1981) *Indian Architecture According to Manasara – Silpasastra*. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation.
 Bound, M (2004) *Urban Social Theory*. Oxford: Oxford University Press.

- Damayanti, R dan Handinoto (2005) Kawasan “Pusat Kota” Dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan di Jawa, *Dimensi Teknik Arsitektur* 3(1).
- Darmosugito (1956) Sejarah kota Yogyakarta, ” *Kota Yogyakarta, 200 Tahun*”, Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1981) *Babad Mangkubumi*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977) *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.
- HamengkuBuwono IX (2013) *Catur Sagotra*. Pidato Pengukuhan Yayasan Catur Sagotra Nusantara, Jakarta.
- Hermanislamet, B (1999) *Tata Ruang Kota Majapahit*. Yogyakarta: UGM.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring 2014.
- K.P.H. Brotodiningrat (1978) *Arti Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta, Museum Kraton Yogyakarta.
- Kostof, Spiro (1991) *The City Shape, Urban Patterns and Meaning Through History*. London: Thames & Hudson.
- Lay, C. dkk (2008) Keistimewaan Yogyakarta, Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, *Monograph on Politics and Government* 2(1).
- Lynch (1960) *The Image of the City*. Cambridge, Massachusetts : MIT Press.
- Marcussen, L (1990) *Third World Housing in Social and Spatial Development: The Case of Jakarta*. Aldershot: Avehury.
- Mumford, L (1991) *The City in History*. London: Penguin
- Nas, PJM (2007) *Kota Kota Indonesia, Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paddison, R, (Ed) (2001) *Handbook of Urban Studies*. London: Sage Publications.
- Radford, JP (1979) Testing the Model of the Pre – Industrial City: The Case of Ante Bellum Charleston, South Carolina, *Transactions of the Institue of Brithish Geographers, New Series* 4, 392 – 410.
- Ricklefs M.C (1974) *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749 – 1792, A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press.
- Revianto dan Sri Suwito (2008) *Dari Kabanaran ke Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DIY.
- Ricoeur, P (2008) *Hermeneutika Ilmu Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Short, John R (1999) *An Introduction to Urban Geography*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Siregar, Sandi Amirudin (1990) *Bandung, The Architecture of The City in Development*. Disertasi pada KU. Leuven, Belgia.
- Sjoberg, G (1960) *The Pre - Industrial City; Past and Present*. Chicago: Free Press.
- Soemardjan S (1962) *Social Changes in Jogjakarta*. Ithaca, NY: Cornel University Press.
- Suryanto A (2002) *Perubahan Penggunaan Lahan kota Yogyakarta Tahun 1756 – 1959*. Disertasi dalam ilmu Geografi, UGM.
- Suryanto (2015) *Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta*, Naskah Disertasi JUTAP FT UGM, Yogyakarta.
- Surjomihardjo, A (2008) *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe, Sejarah Sosial 1880 – 1930*, Jakarta: Komunitas Bambu
- Undang Undang 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- van Diessen, J.R., F.J. Ormeling, R.C.M. Braam, W. Leijnse, P.A. Levi, J.J. Reijnders, R.P.G.A. Voskuil, and M.P.B. Ziellemans (2005) Grote atlas van Nederlands Oost-Indië/Comprehensive atlas of the Netherlands East Indies. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 161(1), 146-149.